



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

B. DAFTAR REGULASI

Regulasi dan Perizinan Terkait MP3EI di Tingkat Nasional

Berikut adalah regulasi dan perizinan di tingkat nasional yang sudah ditetapkan dan perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama:

Tabel Undang-Undang

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum	Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum	Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Tabel Rancangan Undang-Undang

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan

Tabel Peraturan Pemerintah

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Kementerian Kehutanan
2	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025	Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
3	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu	Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A Undang-Undang tentang PPh)	Kementerian Keuangan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Perlunya pengaturan mengenai pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan	Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
9	Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya	Kementerian Lingkungan Hidup
10	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pengaturan mengenai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika
11	Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukung MP3EI	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan kesempatan kerja dalam mendukung pelaksanaan MP3EI	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	Pengaturan mengenai perusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Tabel Rancangan Peraturan Pemerintah

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK	Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu Yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN	Kementerian Keuangan
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan <i>Dumping</i>	Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3	Kementerian Lingkungan Hidup
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria	Penataankembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah	Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengaturan mengenai penambahan kapasitas pembangkit.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan	Optimalisasi penerimaan PNBPNP kehutanan	Kementerian Kehutanan
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Pada KPBPB Batam	Pengelolaan Bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Penambahan wilayah KPBPB Batam	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	Pengaturan untuk meningkatkan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Tabel Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres)

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Pengaturan lebih rinci mengenai pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi 1 geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kementerian Kehutanan
2	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
3	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
4	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
5	Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
6	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2011	Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 4 Jangka Menengah Tahun Tahun 2010-2014	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
7	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan <i>unsolicited project</i> , jaminan pemerintah, serta skema perusahaan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
9	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
10	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
11	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera untuk pelaksanaan Pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
12	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu	Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
13	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali	Percepatan penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI	Kementerian Pekerjaan Umum
14	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian dalam bentuk Perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian	Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
15	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum	Peraturan operasional terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengada-an Tanah untuk Pem-bangunan dalam rang-ka Kepentingan Umum	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga	Kementerian Kehutanan
17	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeo-rologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan stra-tegis untuk mendu-kung pengelolaan sistem Informasi Sumber Daya Air	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
18	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Sebagai pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Badan Penyelenggara Minyak dan Gas (BP Migas)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat	Pengaturan untuk mendukung percepatan infastruktur di Papua dan Papua Barat	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
20	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan <i>unsolicited project</i> , jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur secara <i>'business to business'</i> di dalam kawasan pengusahaannya	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
21	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia	Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Penyeimbangan dan penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/ tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain	Kementerian Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
23	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pengaturan mengenai percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta mendukung pembangunan ekonomi nasional	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Pengaturan mengenai penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RImpres)

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
2	Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	Untuk mendukung percepatan pengembangan Koridor Sumatera dan Konektivitas	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku	Perangkat operasional RTRWN, yang berfungsi antara lain sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Maluku	Kementerian Pekerjaan Umum
4	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara	Perangkat operasional RTRWN, yang berfungsi antara lain sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Nusa Tenggara	Kementerian Pekerjaan Umum
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua	Perangkat operasional RTRWN, yang berfungsi antara lain sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan di Pulau Papua	Kementerian Pekerjaan Umum
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	Ketentuan yang menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan pengadaan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara di lokasi dan dengan jadwal operasi proyek yang ditetapkan dalam Perpres tersebut.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Tabel Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar	Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan bea keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (contoh: industry bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (<i>double taxation</i>)	Kementerian Keuangan
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/ 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Perlunya pengaturan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (<i>tax holiday</i>) untuk mendorong investasi dan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010	Kementerian Keuangan
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor	Perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dalam rangka pelaksanaan Aman-demen Kelima <i>Harmonized System</i> (HS) dan Revisi Kedua ASEAN <i>Harmonized Tariff Nomenclature</i> (AHTN) serta untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
4	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara	Dibutuhkan bagi kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (<i>meeting, incentive, convention, exhibition</i>), Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2007 tentang Impor Sementara	Kementerian Keuangan
5	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri	Perlunya peraturan yang mengatur tentang Penerapan DMO untuk migas, batubara, dan gas untuk pengembangan industri	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar	Perlunya peraturan yang mengatur kejelasan kriteria dan pendayagunaan atas tanah terlantar, khususnya untuk budidaya tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan) dan ternak sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
7	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta memperlancar pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas	Kementerian Pertanian
8	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Menyangkut "Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan"	Kementerian Pertanian
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

No	Peraturan	Substansi	Penanggung Jawab
10	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
11	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN	Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kementerian Keuangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati